



KR-Surya Adi Lesmana

TRUK TERGULING: Truk bermuatan pasir batu (sirtu) terguling di Ring Road Timur, Jalan Majapahit, Karangjambe, Banguntapan, Bantul, tepatnya di depan Pasar Angkasa, Kamis (9/7). Tak ada korban jiwa pada peristiwa yang diduga diawali pecahan ban ini.

Sehari Sambungan hal 1

penambahan kasus terbanyak didapatkan dari Provinsi Jawa Barat, yakni 962 orang dan pasien sembuh dilaporkan 27 orang.

Penambahan angka dari Jabar tersebut didapatkan dari kluster baru Pusedik Pendidikan Sekolah Calon Perwira (Secapa) TNI Angkatan Darat, yang didapatkan dari hasil penyelidikan epidemiologi sejak 29 Juni 2020 berturut-turut hingga kemarin.

"Ini didapatkan dari kluster yang sudah selesai kita lakukan penyelidikan epidemiologi, sejak tanggal 29 Juni, berturut-turut," kata Yuri.

Dari hasil penyelidikan epidemiologi tersebut didapatkan 1.262 kasus positif Covid-19 yang terdiri peserta didik dan beberapa tenaga pelatih

yang ada di sana.

Dari total keseluruhan data tersebut, dilaporkan ada 17 orang yang sudah dirawat dan diisolasi di Rumah Sakit (RS) Dustira Cimahi, dengan keluhan ringan seperti demam, batuk dan sedikit sesak napas.

"Dari jumlah 1.262 kasus positif yang kita identifikasi, hanya ada 17 orang yang saat ini kita rawat dan kita lakukan isolasi di Rumah Sakit Dustira Cimahi, karena ada keluhan, meskipun dalam derajat keluhan ringan," jelas Yuri.

Sedangkan di luar 17 orang tersebut dilaporkan tanpa keluhan dan kondisi sekarang sudah dikarantina secara ketat di kompleks wilayah pendidikan Secapa di Bandung. (Ati)-f

Merapi Sambungan hal 1

ini belum diaktivasi. Namun telah dipersiapkan jika sewaktu-waktu digunakan.

"Tempat sudah siap, termasuk sarana dan prasarannya. Kalau nanti statusnya sudah siaga dan rekomendasi melebihi pemukiman penduduk, baru sumber daya kami aktivasi. Kemudian warga kami evakuasi ke barak pengungsian," kata Makwan.

Menurutnya, sampai saat ini masyarakat lereng Merapi masih aman karena rekomendasi dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) masih radius 3 Km. Sementara penduduk lereng Merapi paling atas berada di jarak 5 Km dari puncak Merapi. "Sejauh ini, masyarakat masih

aman. Soalnya rekomendasi radiusnya masih 3 Km dari puncak. Padahal warga paling atas masih 5 Km dari puncak," tuturnya.

Disinggung jalur evakuasi, Makwan menuturkan, mayoritas jalan evakuasi di lereng Merapi masih bagus. Hanya sebagian kecil yang rusak karena dilalui truk pasir, namun itu berada di daerah bawah.

"Jalan yang rusak itu berada di bawah. Sementara masih ada jalan lain yang bisa digunakan saat evakuasi sehingga tidak akan mengganggu jika sewaktu-waktu ada proses evakuasi," ucap Makwan.

Sementara itu Deputi Pencegahan BNPB Lilik Kumiawan menambahkan, perubahan bentuk tubuh Gunung Merapi menimbulkan dua kemungkinan. Pertama yakni erupsi ek-

splisif, kedua pembentukan kubah lava. Selain itu, sebelumnya juga ada gempa vulkanik dangkal selama 2 hari berturut-turut. "Terjadi gempa vulkanik dangkal, 2 hari berturut-turut ini juga menjadi salah satu indikator. Indikatornya banyak, tetapi kemudian kita harus selalu mengingatkan. Seperti kita tahu ada erupsi-erupsi sebelumnya. Bahkan ketinggian nya sudah sampai di atas 3 km ke atas," jelas Lilik Kamis (9/7).

Menurut Lilik, dengan adanya beberapa indikasi tersebut, pihaknya mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk selalu waspada. Pihaknya juga telah bersurat kepada BPBD DIY dan Jawa Tengah untuk kesiapsiagaan.

(Sni/Aha/Dev)-f

Sultan: Sambungan hal 1

bisa direalisasikan dengan baik. Khususnya di sektor-sektor prioritas dan unggulan di DIY seperti pariwisata, pendidikan, pertanian dan sebagainya. Kebutuhan potensi di masing-masing kabupaten/kota. "Kita hanya mengingatkan agar lebih berhati-hati dalam pemulihan pariwisata dan sebagainya. Jangan sekaligus tetapi bertahap dengan tetap mengacu protokol kesehatan maupun Standard Operating Procedure (SOP)," kata Sultan.

Pandemi Covid-19 belum dapat diprediksi kapan berhenti, sehingga Sultan HB X tetap meminta dalam keadaan darurat dan krisis akibat pandemi kerjanya harus cepat. Suasana kondusif di DIY harus dijaga sehingga penyerapan APBD 2020 bisa terealisasi dengan baik guna memulihkan pertumbuhan perekonomian daerah. "Justru demi memulihkan pertumbuhan ekonomi di DIY ini maka kalau bisa APBD 2020 terserap lebih dari 95 persen dan saat ini baru 80 persen. Karena sisa

waktu penyerapan APBD 2020 sampai akhir tahun, dengan kondisi pandemi Covid-19 seperti ini tidak mungkin menarik investor, sehingga pertumbuhan PDRB kita sangat tergantung penyerapan APBD," tegasnya.

Menurut Sultan HB X, apabila APBD 2020 sudah dikeluarkan tetapi masyarakat DIY tidak melakukan pembelajaran, maka dikhawatirkan akan minus pertumbuhan ekonominya. Sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi DIY terutama di Triwulan III dan IV-2020 tetap tumbuh. Untuk itu seluruh sektor potensial harus dibangkitkan.

"Jangan asal uang keluar, tetapi target penyerapannya di atas 95 persen harus bisa dilakukan, syukur lebih. Jadi jangan ewuh mengeluarkan karena itu duitnya Pusat dan masyarakatnya orang DIY, masa ewuh?" ucap Sultan.

Kepala Perwakilan BI DIY Hilman Tisnawan mengatakan, Pemda DIY telah

mengalokasikan anggaran Rp 368,45 miliar untuk penanganan Covid-19 untuk tiga pos belanja, yakni Rp 85,99 miliar untuk penanganan kesehatan, Rp 36,56 untuk penanganan dampak ekonomi, dan Rp 245,88 miliar untuk penyediaan jaring pengaman sosial. Adapun total realokasi anggaran Pemda se-DIY untuk penanganan Covid-19 tahun ini sebesar Rp 782,47 miliar.

"Akibat dari refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanggulangan dampak Covid-19, ruang fiskal Pemda DIY 2020 mengalami penurunan dibandingkan 2019, yakni dari 24,55 persen menjadi 23,20 persen. Penurunan ini menyebabkan semakin rendahnya kemampuan Pemerintah Daerah untuk dapat merealisasikan program/kegiatan selain belanja wajibnya. Di sisi lain, Pemda DIY juga mengalami penurunan pendapatan yang menyebabkan defisit anggaran semakin besar," tambah Hilman. (Ira)-d

Calon Sambungan hal 1

Masalahnya, eksistensi calon perseorangan saat ini belum berhasil menjadi alternatif bagi krisis demokrasi yang dihadapi Indonesia. Pahalanya, ada écacatí bawaan yang dimiliki mekanisme calon perseorangan, menjadikannya sulit bergerak, layu, lalu mati ditinggalkan. Pertama, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme calon perseorangan, masih mensyaratkan jumlah dukungan yang sangat besar. Yaitu didukung paling sedikit 10% jumlah penduduk dalam kabupaten/kota yang jumlah daftar pemilih tetapnya 250.000 jiwa, 8,5% bagi daerah yang jumlah DPT-nya 250.000-500.000 jiwa. Kemudian 7,5% bagi daerah yang jumlah DPT-nya 600.000-1.000.000 jiwa, dan 6,5% bagi daerah yang jumlah DPT-nya di atas 1.000.000 jiwa. Selain itu, jumlah dukungan tersebut juga harus tersebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan di daerah.

Jumlah tersebut tentu sangatlah besar, sehingga untuk dapat menjadi calon perseorangan membutuhkan sumber daya dan biaya yang tidak sedikit. Padahal, sumber daya yang dimiliki calon perseorangan tentu sangatlah terbatas. Dengan persyaratan yang demikian, maka menjadi calon kepala daerah melalui mekanisme perseorangan berpotensi membutuhkan sumber daya dan biaya yang jauh lebih besar ketimbang melalui partai politik. Wajar saja jika sampai hari ini, jalur perseorangan belum banyak diminati masyarakat.

Kedua, dengan model replikasi sistem pemerintahan nasional ke tingkat daerah. Di mana hampir seluruh kebijakan strategis kepala daerah membutuhkan dukungan mayoritas anggota DPRD. Maka potensi penolakan oleh DPRD sangatlah besar, jika kebijakan itu tidak mengkomodir kepentingan partai politik masing-masing anggota DPRD.

Dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, memenuhi persyaratan dukungan yang demikian besar tidaklah mudah. Bukan hanya sulit mencari relawan yang bersedia untuk mencari syarat ke lapangan, namun masyarakat juga dipastikan enggan untuk bertemu dengan siapapun. Bagi calon perseorangan, yang mensyaratkan dukungan dengan fotokopi e-KTP, dituntut untuk terlebih dahulu dikenal masyarakat tempat dimana ia mencalonkan diri. Pekerjaan tersebut sangat tidak mudah di-

lakukan dalam situasi normal sekalipun, terlebih pada masa pandemi seperti saat ini.

Sekalipun calon perseorangan dinyatakan lolos pada tahapan verifikasi administrasi dan faktual, hambatan belum selesai. Masih banyak mekanisme lanjutan yang tidak kalah sulitnya dan perlu biaya politik sangat besar. Dengan itung-itungan politik yang demikian, tidak mengherankan, banyak orang yang menarik diri menjadi calon perseorangan pada Pemilihan 2020. Tahapan pemilukada sudah dimulai, tentu tidak lagi memungkinkan untuk mengubah mekanisme calon perseorangan. Namun, ini dapat menjadi catatan pemerintah ke depan, dalam rangka merekonstruksi ulang calon perseorangan. (Penulis adalah Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta)-d



Prakiraan Cuaca Jumat, 10 Juli 2020

Lokasi	Cuaca				Suhu C	Kelembaban
	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari		
Bantul	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	23-31	50-90
Sleman	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	23-31	60-90
Wates	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	23-31	50-90
Wonosari	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	23-31	55-90
Yogyakarta	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	23-31	55-90

Cerah Berawan Udara Kabur Hujan Lokal Hujan Pelir

17 Tahun Sambungan hal 1

Daihatsu Catat Market Share 18,4%

JAKARTA (KR) - Memasuki Juni 2020, pasar otomotif Indonesia mulai menunjukkan peningkatan. Seiring penerapan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PS-BB) di berbagai daerah, permintaan masyarakat terhadap kendaraan untuk mendukung mobilitas di tengah pandemi Covid-19 juga mulai naik.

Secara nasional, penjualan retail pasar otomotif Indonesia selama periode Januari-Juni 2020 mencapai sekitar 290.000 unit, atau turun 42 persen dibandingkan periode yang sama 2019. Sementara penjualan retail Daihatsu mencapai 53.577 unit, turun 39 persen dari tahun lalu.

"Performa ini lebih baik daripada penurunan pasar nasional, sehingga market share Daihatsu mengalami kenaikan sebesar 0,8 persen dari 17,6 persen YTD Juni 2019 menjadi 18,4 persen YTD Juni 2020," ujar Amelia Tjandra, Marketing Director dan Corporate Planning & Communication Director PT Astra Daihatsu Motor (ADM) di Jakarta, Kamis (9/7).

Sedangkan pencapaian whole sales untuk periode Januari-Juni 2020, pasar nasional berada di sekitar 260.000, turun 46 persen dibandingkan tahun lalu. Sementara performa Daihatsu di periode Januari-Juni 2020 mencapai angka 49.774 unit, atau turun 43 persen dibanding periode yang sama 2019, lebih baik dari penurunan pasar, sehingga market share Daihatsu secara whole sales mengalami kenaikan dari 18,1 persen YTD Juni 2019 menjadi 19,1 persen YTD Juni 2020.

Secara model, penjualan retail sales Daihatsu masih tetap didominasi oleh Astra Daihatsu Sigr dengan pencapaian sebesar 15.194 unit, berkontribusi sebesar 28,4 persen. Kemudian diikuti Gran Max Pick-Up 11.010 unit (20,5 persen), dan Terios 8.360 unit (15,6 persen).

"Pasar ritel otomotif nasional mulai menunjukkan peningkatan di bulan Juni 2020 dengan kenaikan hampir dua kali lipat dibandingkan Mei 2020. Kami harap masyarakat tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan walaupun Pemerintah sudah mulai melakukan relaksasi PSBB, agar aktivitas ekonomi dapat terus bergulir," kata Amelia Tjandra. (Imd)-f

akan bisa sembunyi dari hukum.

Dalam kesempatan itu, Yasonna juga menjelaskan alasan dirinya memimpin proses ekstradisi terhadap Maria Pauline. "Ini untuk menunjukkan keseriusan, Indonesia berkomitmen untuk tujuan penegakan hukum. Puncaknya adalah pertemuan saya dengan Presiden Serbia pada awal pekan ini untuk menegaskan proses ekstradisi Maria Pauline Lumowa," ujarnya.

Yasonna juga menyatakan, masa penahanan Maria Pauline Lumowa akan habis pekan depan. Itu sebabnya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM meningkatkan intensitas percepatan ekstradisi ini selama sebulan terakhir.

Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka pembobolan kas BNI lewat *Letter of Credit (L/C)* fiktif senilai Rp 1,2 triliun. Maria menjadi buronan penegak hukum Indonesia selama 17 tahun, setelah terbang ke Singapura pada September 2003 atau sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus bentukan Mabes Polri.

Pemerintah Indonesia sebenarnya dua kali mengajukan proses ekstradisi Maria Pauline Lumowa kepada Pemerintah Kerajaan Belanda pada 2009 dan 2014. Namun, dua kali itu pula ditolak. Permintaan ekstradisi diajukan kepada Pemerintah Belanda karena perempuan kelahiran Paleoloan Sulawesi Utara, itu didapati sudah menjadi warga negara Belanda sejak 1979.

Maria Pauline Lumowa kemudian ditangkap petugas NCB Interpol Serbia saat mendarat di Bandara Internasional Nikola Tesla Juli 2019. Penangkapan dilakukan berdasarkan *red notice* pada 2003.

Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan, tersangka pembobol kas BNI sebesar Rp 1,2 triliun, Maria Pauline Lumowa telah tiba di Bareskrim Polri. Dia akan ditangani lebih lanjut untuk diproses secara hukum atas perbuatannya.

Listyo mengatakan, sebelum dibawa ke Bareskrim Polri Maria sudah tiba terlebih dulu di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat GA 9790. Tersangka langsung diserahkan ke Bareskrim Polri.

Menkumham Yasonna mengatakan, Maria Pauline telah menjalani serangkaian tes kesehatan serta telah melengkapi data keimigrasian sebelum diserahkan ke pihak kepolisian. Maria Pauline juga diberikan hak untuk menunjuk penasehat hukum.

Berdasarkan percakapan Maria dengan Menkopolkumham Mahfud MD, ia akan menunjuk kuasa hukum dari Kedutaan Besar Belanda. (Ful)-f

Pasar Sambungan hal 1

Bantul mengemukakan, dari 8 penambahan pasien positif tersebut, dua di antaranya pedagang dari Pasar Sungapan Sedayu, satu penjaja malam Pasar Sorobayan Sanden. Selebihnya dari kecamatan lain, termasuk satu orang dari Dlingo. Padahal selama ini Dlingo belum pernah ada pasien Covid-19. Penambahan pasien positif Covid-19 di Bantul dalam beberapa hari ini pada umumnya dari penularan lokal.

Karena dari hasil pemeriksaan Swab Dinas Kesehatan Bantul, di Pasar Sungapan terdapat 2 orang positif Covid-19, maka Pasar Sungapan akan ditutup sementara mulai Jumat hingga Minggu (10-12/7) untuk dilakukan sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan.

Dengan perkembangan kondisi penularan Covid-19 di Bantul semakin meningkat, maka Pemkab Bantul akan lebih giat menggalakkan operasi patuh protokol kesehatan. "Masyarakat juga diminta kesadaran ikut membantu upaya pencegahan penularan dan penanganan Covid-19, dengan mematuhi protokol kesehatan, utamanya memakai masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak dan lainnya," pinta Sekda Bantul.

Menurut Helmi, yang masih banyak dilakukan warga tidak mematuhi protokol kesehatan yakni tidak menjaga jarak, masih banyak kerumunan orang di mana-mana. "Padahal sudah sering diperingatkan tetapi tetap bandel,"

ungkapnya.

Pemkab Bantul saat ini juga baru membuat draf peraturan, tentang penindakan terhadap warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Diharapkan peraturan tersebut bisa segera diterbitkan.

Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DIY ini menyampaikan laporan keseluruhan kasus positif Covid-19 terdapat dua tambahan kasus sembuh dengan total kasus sembuh 287 kasus di DIY. Dua kasus sembuh tersebut yaitu kasus 276 perempuan (80) warga Kota Yogya dan kasus 332 perempuan (29) warga Kota Yogyakarta. Laporan meninggal PDP dalam proses yang belum sempat swab adalah perempuan (40) warga Sleman dengan penyakit penyerta Hipertensi dan Diabetes Mellitus (DM).

"Jumlah sampel telah diperiksa sebanyak 348 sampel dari 261 orang di DIY. Total PDP mencapai 1959 orang dengan 85 orang masih dalam perawatan dan total Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 7.807 orang di DIY," imbuh Berty.

Berdasarkan hasil laboratorium sebanyak 357 orang dinyatakan positif dengan 287 orang di antaranya sembuh dan 9 orang meninggal dunia serta 1.481 orang dinyatakan negatif. Sementara itu, sebanyak 121 orang masih menunggu proses uji laboratorium dengan 27 orang di antaranya telah meninggal dunia. (Ira/Ria/Jdm)-f

INSPIRASI UNTUK KEBIJAKAN

Nasib Posyandu Lansia Saat Pandemi Covid-19

WAKTU bergulir melewati bulan keempat sejak kasus Covid-19 pertama kali ditemukan di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun, persentase kematian karena Covid-19 di Indonesia tertinggi dialami kelompok umur 60 tahun ke atas. Seperti yang kita ketahui lanjut usia (lansia) adalah salah satu kelompok rentan dan mudah terpapar Covid-19.

Lalu bagaimana posyandu lansia berperan di tengah pandemi? Pemerintah saat ini sudah berupaya untuk memutus mata rantai penularan virus Corona. Imbauan untuk *physical distancing*, bekerja, belajar dan beribadah di rumah terus digaungkan. Semua kegiatan yang membuat kerumunan harus dihindari termasuk kegiatan posyandu lansia. Peran posyandu lansia melalui kader sangat penting untuk selalu memonitor kondisi para lansia.

Meski kegiatan posyandu lansia ditiadakan sementara, namun peran kader masih berjalan. Kader berperan memberikan informasi kepada lansia tentang perilaku hidup sehat dan menjaga kesehatan selama pandemi berlangsung. Informasi tersebut diberikan pada saat kader bertemu dengan lansia di jalan atau di masjid. Kader juga membagikan masker kain untuk lansia, baik yang dibeli sendiri dari kas posyandu maupun dari bantuan lembaga lain. Peran lain yang tak kalah penting adalah kerjasama antar stakeholder, seperti dengan pihak RT. Oleh karena cakupan wilayah kecil dan saling berdekatan, maka akan lebih memudahkan dalam memantau kondisi lansia.

Lalu apakah lansia merasakan dampak pandemi Covid-19? Dampak sosial dirasakan lansia dengan tidak adanya posyandu lansia, ternyata menurunkan kesehatan psikologis. Kegiatan posyandu lansia tidak hanya mempertahankan kesehatan fisik agar selalu bugar, namun posyandu lansia

juga sebagai wadah bertemu dengan teman sebayanya, lansia bisa saling berkomunikasi dan berinteraksi. Pada masa pandemi ini mereka merasa kesepian karena tidak bisa berkumpul.

Selain dampak sosial, dampak ekonomi juga dirasakan oleh lansia. Seperti yang dialami oleh Mbah Marto (70) yang biasanya menjual beras di Pasar Kotagede Yogyakarta. Namun selama pandemi dia tidak lagi berani ke pasar. Dia hanya menjual beras di rumah yang berdampak pada berkurangnya pendapatan. Kisah yang sama, juga dialami oleh banyak lansia lain yang senasib dengan Mbah Marto.

Dampak yang tidak kalah penting adalah kesadaran lansia untuk melindungi diri sendiri masih kurang. Contoh nyata yang terlihat pada saat lansia beraktivitas di luar rumah, banyak yang tidak menggunakan masker. Tidak sedikit juga lansia yang menanyakan kenapa harus pakai masker, kenapa harus di rumah saja.

Keluarga lansia sendiri tidak bisa menyampaikan informasi dengan jelas, lansia banyak yang tidak menonten berita di televisi, kader posyandu tidak bisa banyak berperan di situasi seperti sekarang. Hal ini membuktikan bahwa informasi yang mereka terima tentang Covid-19 masih kurang sedangkan mereka rentan tertular.

Apa yang perlu dilakukan untuk membantu lansia yang terdampak Covid-19?

Kelompok usia lanjut merupakan golongan yang memerlukan perhatian khusus. Sesuai amanah 'Panduan Perlindungan Lansia' oleh KPPPA diperlukan peran dari kader posyandu lansia di level masyarakat untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi lansia di masa pandemi Covid-19 dengan melibatkan dan bekerjasama lintas sektor.

Kader posyandu berharap adanya bantuan berupa sembako dan makanan bergizi. Lansia masih kurang diperhatikan, belum ada bantuan yang khusus menyasar mereka. Bantuan lain yang diterima lansia adalah masker kain, sembako, hand sanitizer. Namun demikian bantuan tersebut belum diterima semua lansia di posyandu. Harapannya, jika menyalurkan bantuan pemerintah desa dapat bekerjasama dengan kader posyandu dalam pendistribusiannya.

Tak kalah penting yang harus diperhatikan bagaimana lansia bisa mendapatkan informasi yang tepat dan jelas mengenai Covid-19. Menurut kader posyandu, mereka sebaiknya diberikan informasi dari sumber yang berkompeten, seperti petugas dari puskesmas. Namun di masa pandemi seperti ini, petugas kesehatan sudah memiliki banyak tugas untuk menangani pasien di garda terdepan. Langkah bijak yang bisa dilakukan salah satunya dengan mendokumentasikan informasi tentang Covid-19 dari berbagai sumber terpercaya seperti yang diterbitkan oleh kementerian terkait.

Pemerintah desa bisa membantu melakukan koordinasi untuk pendokumentasian, selanjutnya disampaikan melalui karang taruna, RT, RW, atau kader posyandu. Kader dengan networking yang luas akan menyampaikan informasi kepada lansia. Libatkan juga keluarga dan masyarakat agar secara aktif menjelaskan informasi tentang Covid-19 kepada lansia. Selaras juga dengan pedoman umum menghadapi Covid-19 yang dikeluarkan oleh Kemendagri, bahwa pastikan lansia memperoleh kesadaran dan perlindungan pribadi terkait Covid-19.

***) Hendri Setyo Nugroho SH MIP. Peneliti Survey METER.**